



KEMENPKP
REPUBLIC INDONESIA



RENCANA STRATEGIS

**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I
TAHUN 2025 2029**

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Tahun 2025 – 2029 dapat diselesaikan. Rencana Strategis ini kami susun untuk memberikan arahan tentang arah kebijakan dalam Pembangunan sektor Perumahan dan Kawasan permukiman untuk periode lima tahun kedepan, serta sebagai salah satu wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah di bidang penyediaan Perumahan dan Kawasan permukiman.

Substansi Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Tahun 2025-2029 merupakan tindak lanjut dari visi pembangunan jangka panjang Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 menetapkan cita-cita menuju Indonesia Emas 2045. Balai P3KP Nusa Tenggara I memegang peran strategis sebagai Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan penyediaan hunian yang layak, terjangkau dan berkeadilan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bali, serta penataan kawasan permukiman yang aman, inklusif, produktif, dan berketahanan terhadap perubahan lingkungan dan bencana. Renstra ini memuat kondisi umum, potensi dan permasalahan, tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kelembagaan untuk kurun waktu 2025-2029.

Renstra ini diharapkan menjadi kerangka acuan dan pedoman dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bersifat multisektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat pusat dan daerah, swasta dan masyarakat terutama dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Lombok Barat, 31 Desember 2025
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Nusa Tenggara I



Rizaldi A. Atjo, S.T., M.T.
NIP. 198202192009031001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB 1 PENDAHULUAN	6
1.1 Kondisi Umum	6
1.2 Potensi dan Permasalahan	16
1.2.1 Potensi Wilayah Kerja	16
1.2.2 Permasalahan Wilayah NTB dan Bali	17
1.2.3 Implikasi terhadap Peran BP3KP Nusa Tenggara I	21
BAB 2 TUJUAN DAN SASARAN	22
2.1 Tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I	22
2.2 Sasaran Program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I	22
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	27
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Entitas Unit Organisasi	27
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I	28
3.3 Kerangka Kelembagaan	31
3.3.1 Reposisi Kelembagaan dan Pembentukan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I di bawah Kementerian PKP	31
3.3.2 Tugas dan Fungsi BP3KP Nusa Tenggara I	33
3.3.3 Struktur Organisasi yang Diperlukan	34
3.3.4 Tata Laksana Internal dan Eksternal	35
3.3.5 Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)	36
BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	40
4.1 Target Kinerja	40
4.2 Kerangka Pendanaan	43
BAB 5 PENUTUP	44

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi NTB	7
Tabel 1. 2	Luas Wilayah pada Masing-Masing Kabupaten/Kota	8
Tabel 1. 3	Data RTLH dan <i>Backlog</i> Rumah di Provinsi Bali	9
Tabel 1. 4	Rumah Tangga yang Mengakses Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024	10
Tabel 1. 5	<i>Backlog</i> Kepemilikan dan Kepenghunian di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024	11
Tabel 1. 6	Luas Kawasan Kumuh dan Kawasan Kumuh yang Tertangani Tahun 2020-2024.....	11
Tabel 1. 7	Capaian pembangunan perumahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu 2020-2024.....	13
Tabel 2. 1	Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	21
Tabel 3. 1	Jumlah Pegawai pada BP3KP Nusa Tenggara 1 Berdasarkan Klasifikasi	34
Tabel 3. 2	Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan pada BP3KP Nusa Tenggara I.....	34
Tabel 3. 3	Jumlah Pegawai BP3KP Nusa Tenggara I Berdasarkan Satuan Kerja dan Pendidikan	35
Tabel 3. 4	Rekapitulasi Target Kinerja Balai P3KP Nusa Tenggara I 2025-2029.....	38
Tabel 3. 5	Rekapitulasi Target Kinerja Balai P3KP Nusa Tenggara I 2025-2029.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Wilayah Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I.....	8
Gambar 2. 1 Pohon Kinerja BP3KP Nusa Tenggara I.....	20

1.1 Kondisi Umum

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I merupakan hasil dari proses reorganisasi dan transformasi kelembagaan yang signifikan dari unit kerja sebelumnya yang dikenal sebagai BP2P Nusa Tenggara I (Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I), yang pada awalnya berada di bawah Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Perubahan kelembagaan ini merupakan bagian dari penataan struktur organisasi pemerintah pusat seiring dengan perubahan nomenklatur dan pembagian tugas kementerian dalam Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029, sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara. Transformasi tersebut menandai perluasan mandat dan penguatan peran balai, tidak hanya dalam penyediaan perumahan tetapi juga dalam pengembangan dan penanganan kawasan permukiman secara lebih terintegrasi sesuai dengan arah kebijakan nasional.

Entitas Sebelumnya : BP2P Nusa Tenggara I (Kementerian PUPR)

- **Kedudukan Awal:** Sebelum dilakukan reorganisasi kelembagaan, Balai P3KP Nusa Tenggara I sebelumnya merupakan BP2P Nusa Tenggara I (Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I) yang dibentuk pada Juni 2020 dan berada di bawah Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
- **Wilayah dan Tugas:** BP2P Nusa Tenggara I memiliki tugas melaksanakan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan lingkup penugasan balai pada saat itu.
- **Fokus Program:** Dalam pelaksanaannya, BP2P Nusa Tenggara I berfokus pada penyelenggaraan program pembangunan perumahan sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan Direktorat Jenderal Perumahan, dengan penyusunan laporan kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian PUPR periode Tahun 2020–2024.

Entitas Saat Ini: BP3KP Nusa Tenggara I (Kementerian PKP)

Kedudukan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Nusa Tenggara I dalam mendukung pencapaian peran dan tujuan organisasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai unit pelaksana teknis yang menjalankan tugas teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman di wilayah kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, BP3KP Nusa Tenggara I berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, serta memiliki hubungan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, BP3KP Nusa Tenggara I memiliki wilayah kerja yang meliputi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali sebagai area layanan utama dalam penyelenggaraan program perumahan dan kawasan permukiman.

Provinsi NTB yang terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa serta 401 pulau kecil yang tersebar disekitarnya, Provinsi NTB memiliki 8 Kabupaten dan 2 Kota dengan total luas wilayah 19.675 Km², . Pulau Lombok berada di sebelah barat yang berbatasan dengan selat lombok dan pulau bali, dan Pulau Sumbawa berada di sebelah timur yang berbatasan laut dengan selat sape dan Provinsi NTT, sementara itu sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Secara geografis provinsi NTB memiliki topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi, dengan kondisi wilayah yang beragam mulai dari pegunungan dan hutan tropis, pertanian lahan kering, pantai dan potensi wisata dan pertanian yang unggul.

Tabel 1. 1 Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi NTB

KAB/KOTA	LUAS (Km ²)	%	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN
Kota Mataram	60,42	0,31	6	50
Kab. Lombok Barat	923,06	4,69	10	122
Kab. Lombok Utara	811,19	4,12	5	43
Kab. Lombok Tengah	1169,52	5,94	12	154
Kab. Lombok Timur	1606,47	8,16	21	254
Pulau Lombok	4570,66	23,23	54	623
Kab. Sumbawa Barat	1743,58	8,86	8	65
Kab. Sumbawa	6655,92	33,83	24	165
Kab. Dompu	2281,75	11,6	8	81
Kab. Bima	4216,09	21,43	18	191
Kota Bima	207,89	1,06	5	41
Pulau Sumbawa	15105,23	76,77	63	543
Luas NTB	19675,89	100	117	1.166

Sumber: LPJK Tahhun 2024 Provinsi NTB, 2025

Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dengan luas sekitar 5.780 km². Secara administratif, Bali terdiri atas 8 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng, serta Kota Denpasar sebagai ibu kota provinsi. Secara geografis, Provinsi Bali berbatasan dengan Selat Bali dan Provinsi Jawa Timur di sebelah barat, Selat Lombok dan Provinsi Nusa Tenggara Barat di sebelah timur, Laut Bali di sebelah utara, serta Samudra Hindia di sebelah selatan. Kondisi topografi Bali didominasi oleh wilayah pegunungan dan perbukitan di bagian tengah yang membentang dari barat ke timur. Variasi geografi lahan di Bali meliputi kawasan hutan, lahan pertanian sawah dan tegalan, wilayah pesisir, serta kawasan terbangun di wilayah perkotaan dan destinasi wisata.

Tabel 1. 2 Luas Wilayah pada Masing-Masing Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)
Buleleng	1.364,73
Tabanan	1.013,88
Jembrana	841,8
Karangasem	839,54
Bangli	490,71
Badung	418,62
Gianyar	368
Klungkung	315
Kota Denpasar	127,78
Total Provinsi Bali	5.780,06

Sumber: BPS Provinsi NTB



Gambar 1. 1 Peta Wilayah Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I

Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi Bali khususnya dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional. Permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan fisik seperti lahan, pendanaan, dan infrastruktur dasar, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, tata kelola, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan akan perumahan baru semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu dari sisi penyediaan, jumlah rumah yang terbangun belum mampu memenuhi pertumbuhan itu sendiri. Hal lain yang menghambat adalah lahan mahal, izin rumit, kurangnya SDM terampil konstruksi, serta tantangan infrastruktur (air, sanitasi, listrik) dan pengelolaan tata ruang yang belum optimal. Hal ini memunculkan adanya *Backlog* atau ketimpangan antara pemenuhan dan kebutuhan rumah. Selain itu adanya rumah tidak layak huni masih perlu mendapat peningkatan kualitas untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat. Provinsi Bali sendiri memiliki permasalahan tersebut seperti *Backlog* dan RTLH, berikut merupakan data *Backlog* dan RTLH di Provinsi Bali.

Tabel 1. 3 Data RTLH dan *Backlog* Rumah di Provinsi Bali

No.	Kabupaten/Kota	Backlog Kepemilikan	Backlog Kualitas	Total Backlog Perumahan
1	KAB. BULELENG	30.719	38.482	69.201
2	KAB. KARANGASEM	11.563	30.856	42.419
3	KAB. TABANAN	10.844	21.635	32.479
4	KAB. GIANYAR	9.924	14.503	24.427
5	KAB. JEMBRANA	11.761	11.944	23.705
6	KAB. BANGLI	4.113	17.183	21.296
7	KOTA DENPASAR	14.133	3.818	17.951
8	KAB. BADUNG	4.959	7.420	12.379
9	KAB. KLUNGKUNG	3.173	8.713	11.886
	Total	101.189	154.554	255.743

Sumber: *Sumber: <https://my.pkp.go.id/dashboardhome>*

Perumahan dan Kawasan Permukiman di Bali terlihat jelas pada sektor pariwisata yang mendukung ekonomi. Kondisi Bali yang merupakan destinasi wisata dunia dengan budaya menjadikan objek primadona yang harus dipertahankan dan dikembangkan, menyebabkan masyarakat Bali menjaga budayanya dengan kearifan lokal yang berpedoman pada Tri Hita Karana, sehingga dalam mendukung ketentuan tersebut sebagian sudah dicetuskan dalam Peraturan daerah Provinsi Bali. Perda terkait pembangunan perumahan adalah seperti Perda Provinsi Bali No.5 Tahun 2015 tentang persyaratan arsitektur bangunan gedung, dan Perda Provinsi Bali No. 16 Tahun 2019 tentang RTRW Provinsi Bali tertuang tentang batas ketinggian bangunan maksimal setinggi pohon kelapa (\pm 15 meter), hal ini menjadikan perhatian bagi kita semua terutama Pemerintah Pusat untuk tanggap terhadap permasalahan Bali yang tidak boleh diperlakukan sama dengan Provinsi lainnya. Dalam hal

pembangunan perumahan vertikal (Rumah Susun) saat ini masih kurang diminati di Provinsi Bali hal ini selain dikarenakan pembatasan ketinggian bangunan juga budaya bermukim dan keakraban di rumah tapak yang kental dengan kearifan lokal.

Sementara itu, Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Nusa Tenggara Barat tercatat sebanyak 509.645 rumah tangga yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Persentase RTLH tertinggi terdapat di Kabupaten Lombok Barat (41,12%), diikuti Lombok Tengah (39,70%) dan Lombok Utara (39,07%). Dari sisi jumlah, RTLH terbanyak berada di Kabupaten Lombok Tengah (131.677 rumah tangga) dan Lombok Timur (129.433 rumah tangga).

Di wilayah Pulau Sumbawa, jumlah RTLH terbesar terdapat di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima, sementara persentase terendah berada di Kota Bima (16,44%). Data ini menunjukkan bahwa penanganan RTLH di NTB masih menjadi prioritas, terutama di wilayah dengan tingkat dan jumlah yang tinggi di Pulau Lombok.

Tabel 1. 4 Rumah Tangga yang Mengakses Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	Kabupaten/Kota	Backlog Kepemilikan	Backlog Kualitas	Total Backlog Perumahan
1	KAB. LOMBOK TIMUR	60.672	103.393	164.065
2	KAB. LOMBOK TENGAH	22.089	82.866	104.955
3	KAB. LOMBOK BARAT	26.593	59.678	86.271
4	KAB. BIMA	15.939	38.322	54.261
5	KAB. SUMBAWA	12.686	33.066	45.752
6	KOTA MATARAM	26.223	17.085	43.308
7	KAB. LOMBOK UTARA	5.474	28.855	34.329
8	KAB. DOMPU	6.293	16.432	22.725
9	KOTA BIMA	6.042	6.231	12.273
10	KAB. SUMBAWA BARAT	5.364	6.638	12.002
	TOTAL	187.375	392.566	579.941

Sumber: <https://my.pkp.go.id/dashboardhome>

Backlog rumah tangga di Provinsi NTB pada tahun 2025 sesuai dengan data MyPKP Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kondisi *Backlog* Kepemilikan di Provinsi NTB tahun 2025 sebesar 187.375 Kepala Keluarga atau 9,85% dan *Backlog* Kualitas sebesar 392.566 atau 20,64% sehingga total *Backlog* di Provinsi NTB sebesar 579.941 Kepala Keluarga atau sebesar 30,49% dari total jumlah keluarga di NTB yaitu 1.902.257 Keluarga.

Salah satu amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2011 adalah penataan dan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh, lebih lanjut ditegaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 yang dimaksudkan Perumahan dan Kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Luas kawasan kumuh di NTB berdasarkan SK Bupati/walikota se-NTB adalah 612,83 Ha yang tersebar di 10 kabupaten/kota sedangkan capaian penataan kawasan kumuh tahun 2024 baru seluas 297,47 Ha di seluruh kawasan kumuh kabupaten/kota se NTB sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. 5 Luas Kawasan Kumuh dan Kawasan Kumuh yang Tertangani Tahun 2020-2024

No	Kab./Kota	Total Luasan Pekerjaan Penanganan Perkim TA. 2020-2024 (Ha)	Luas Kumuh berdasarkan SK 2023 (Ha)	Sisa Luas Kumuh Belum Tertangani berdasarkan SK 2023 (Ha)
1	Kota Mataram	3,85	12,04	8,19
2	Kab. Lombok Utara	23,44	78,07	54,63
3	Kab. Lombok Barat	6,88	37,64	30,76
4	Kab. Lombok Tengah	7,98	29,19	21,21
5	Kab. Lombok Timur	12,33	64,68	52,35
6	Kab. Sumbawa Barat	1,94	10,44	8,50
7	Kab. Sumbawa	25,54	200,82	175,28
8	Kab. Dompu	9,53	91,90	82,37
9	Kota Bima	11,56	24,65	13,09
10	Kab. Bima	5,92	63,40	57,48
	Total	108,97	612,83	503,86

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, 2024

Pada aspek kebencanaan, sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan bencana cukup tinggi, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam 10 tahun terakhir mengalami 483 kejadian bencana (KRB Provinsi NTB 2022-2026), dengan banjir sebagai jenis yang paling sering terjadi dan gempabumi sebagai yang berdampak paling besar. Kondisi ini menunjukkan tingginya risiko kebencanaan yang secara langsung memengaruhi sektor perumahan dan kawasan permukiman.

Banjir menyebabkan kerusakan berulang pada rumah dan infrastruktur dasar, terutama di kawasan dataran rendah dan permukiman dengan sistem drainase yang belum memadai. Sementara itu, gempa bumi menimbulkan kerusakan masif pada hunian dan fasilitas umum akibat masih terbatasnya penerapan standar bangunan tahan gempa. Sejarah kebencanaan tersebut menegaskan pentingnya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berketahanan bencana melalui penguatan standar teknis bangunan, penataan ruang berbasis mitigasi risiko, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat di NTB.

Sementara itu, wilayah Bali dalam 20 (dua puluh) tahun terakhir tercatat mengalami 494 kejadian bencana berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Bali 2024–2028. Jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak adalah cuaca ekstrem, yang umumnya berupa hujan lebat disertai angin kencang dan berpotensi memicu pohon tumbang maupun kerusakan bangunan. Adapun bencana dengan dampak terbesar adalah banjir, yang menyebabkan kerusakan signifikan pada rumah, infrastruktur lingkungan, serta mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor perumahan dan kawasan permukiman di Bali memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi, khususnya terhadap bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perencanaan tata ruang berbasis mitigasi risiko, peningkatan kualitas konstruksi bangunan, serta penyediaan infrastruktur dasar yang memadai guna mewujudkan hunian yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana.

Rencana Strategis (Renstra) BP3KP Nusa Tenggara I Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan balai dalam kurun waktu lima tahun. Penyusunan Renstra ini juga menjadi refleksi atas capaian kinerja pada periode sebelumnya Tahun 2020–2024 saat balai masih bernama BP2P Nusa Tenggara I, sekaligus sebagai respons terhadap dinamika isu perumahan dan kawasan permukiman serta kebutuhan masyarakat di wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali. Pada periode Renstra sebelumnya, balai telah melaksanakan mandat pemerintah pusat di sektor perumahan secara efektif dan efisien, dengan capaian kinerja yang secara umum menunjukkan hasil yang baik dan selaras dengan target perencanaan serta perjanjian kinerja tahunan.

Dalam pelaksanaan operasional, BP3KP Nusa Tenggara I memiliki tanggung jawab strategis dalam pembangunan rumah susun, rumah khusus, serta peningkatan kualitas rumah swadaya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai upaya pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH). Pelaksanaan berbagai program tersebut menunjukkan konsistensi balai dalam mendukung penyediaan hunian layak dan pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan di

wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali sesuai dengan arah kebijakan nasional.

Dalam kurun waktu 2020-2024, capaian Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 6 Capaian pembangunan perumahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Uraian Target PK, Capaian dan Kinerja Tahun 2020 - 2024														
		2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman																
1	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	3	3	100	4	4	100	5	5	100	4	4	100	2	2	100
2	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	2900	2900	100	4240 NAHP 1240 (tanpa NAHP)	1240 (tanpa NAHP)	100	4312	4312	100	1542	1542	100	1275	1275	100
3	Jumlah Bantuan Pengembangan Sarana Hunian Pendukung KSPN	915	915	100												
4	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	-	-	-	122	122	100	28	28	100	-	-	-	72	72	100
5	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	4	4	100	1	1	100	4	4	100	4	4	100	1	1	100
6	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	-	-	-	314	314	100	150	150	100	28	28	100	22	22	100
7	Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	-	-	-	40	40	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	-	-	-	970	942 (sesuai SK)	97.11	795	796	100.13	1300	1493	114.85	700	750	107.14
9	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	-	-	-	-	-		-	-	-	2	2	100	3	3	100
Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Permukiman																
1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	1	100	2	2	100	2	2	100	1	1	100	1	1	100
2	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	1	100	2	2	100	2	2	100	2	2	100	2	2	100
3	Jumlah Layanan Perkantoran	1	1	100	2	2	100	2	2	100	2	2	100	2	2	100

Capaian Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I selama periode 2020 - 2024 antara lain:

- a. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya sebanyak 11.269 unit;
- b. Jumlah Bantuan Pengembangan Sarana Hunian Pendukung KSPN sebanyak 915 unit;
- c. Jumlah Rumah Susun yang dibangun sebanyak 222 unit;
- d. Jumlah Rumah Susun yang dipelihara sebanyak 14 tower;
- e. Jumlah Rumah Khusus yang dibangun sebanyak 514 unit;
- f. Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara sebanyak 40 unit;
- g. Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU sebanyak 3.981 unit.

Periode Tahun 2020–2024 merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan perumahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I (Balai P2P NT I) sebagai unit pelaksana teknis perwakilan pemerintah pusat di daerah. Pada periode tersebut, Balai P2P NT I berperan strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan perumahan nasional sebagaimana Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan, khususnya dalam upaya peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selama periode 2020–2024, penyelenggaraan perumahan difokuskan pada dua pendekatan utama, yaitu pembangunan hunian baru serta peningkatan kualitas rumah eksisting. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan nasional dalam penanganan *Backlog* perumahan, pengurangan kawasan kumuh, serta penyediaan hunian yang memenuhi standar kelayakan dasar sesuai parameter Sustainable Development Goals (SDGs). Melalui pelaksanaan program pembangunan rumah susun, rumah khusus, bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya (BSPS), dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), Balai P2P NT I secara konsisten berkontribusi terhadap peningkatan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau.

Memasuki periode perencanaan Tahun 2025–2029, arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana menempatkan sektor perumahan dan kawasan permukiman sebagai salah satu pilar penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta penguatan ketahanan wilayah. Sejalan dengan hal tersebut, Renstra Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menekankan perlunya percepatan pemenuhan kebutuhan hunian layak, penguatan penyelenggaraan perumahan berbasis kolaborasi pusat dan daerah, peningkatan kualitas kawasan permukiman, serta penguatan tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan PKP.

Dalam konteks tersebut, Balai P3KP Nusa Tenggara I pada periode 2025–2029 dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, antara lain meningkatnya kebutuhan hunian akibat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, tuntutan peningkatan kualitas kawasan permukiman secara terpadu, kebutuhan integrasi perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah, serta

penguatan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam penyelenggaraan PKP. Tantangan tersebut menuntut perubahan pendekatan dari yang semata-mata berorientasi pada *output* fisik menuju pendekatan yang lebih holistik, berkelanjutan, dan berbasis kolaborasi.

Renstra Balai P3KP Nusa Tenggara I Tahun 2025–2029 selanjutnya diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memastikan kesinambungan pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman secara berkelanjutan. Melalui Renstra ini, Balai P3KP Nusa Tenggara I diarahkan untuk mendorong terwujudnya akses hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat secara berkeadilan, sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan memperkuat sinergi pusat dan daerah serta mendorong peran aktif pemangku kepentingan, Renstra ini diharapkan menjadi landasan dalam mewujudkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang inklusif, tangguh, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I mencakup Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan geografis yang berbeda namun saling melengkapi. Kondisi tersebut membentuk dinamika kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman yang kompleks, sekaligus menyediakan potensi strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana diarahkan dalam dan Renstra Kementerian PKP Tahun 2025–2029.

1.2.1 Potensi Wilayah Kerja

Wilayah NTB dan Bali berada pada jalur pengembangan kawasan strategis nasional, khususnya dalam konteks pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, dan pusat pertumbuhan wilayah timur Indonesia. Posisi ini menjadikan kebutuhan akan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan semakin meningkat, baik bagi masyarakat lokal, pekerja sektor formal dan informal, maupun penduduk pendatang. Keberadaan BP3KP Nusa Tenggara I sebagai unit pelaksana teknis Kementerian PKP di wilayah regional memberikan potensi penguatan peran pemerintah pusat dalam memastikan keterpaduan kebijakan, konsistensi standar teknis, serta efektivitas pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman lintas kabupaten/kota dan lintas provinsi.

Provinsi NTB memiliki kawasan strategis nasional, seperti Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan kawasan pariwisata penunjangnya. Perkembangan kawasan ini mendorong tumbuhnya pusat-pusat permukiman baru dan peningkatan kebutuhan hunian bagi tenaga kerja sektor pariwisata, jasa, dan konstruksi. Kondisi ini menjadi peluang bagi pengembangan

perumahan MBR, rumah pekerja, serta kawasan permukiman terintegrasi yang didukung prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai. Secara spasial, NTB masih memiliki ketersediaan lahan yang relatif lebih longgar dibandingkan wilayah metropolitan. Hal ini membuka peluang pengembangan perumahan berbasis kawasan, termasuk pembangunan rumah tapak, rumah swadaya, dan kawasan perdesaan produktif yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Masyarakat NTB memiliki karakteristik sosial yang kuat dalam hal kebersamaan dan gotong royong, khususnya di wilayah perdesaan. Modal sosial ini mendukung efektivitas pelaksanaan program peningkatan kualitas rumah swadaya, bantuan stimulan perumahan, serta program berbasis pemberdayaan masyarakat yang menjadi salah satu fokus kebijakan Kementerian PKP. Pengalaman penanganan pasca-bencana gempa bumi di NTB memberikan pembelajaran penting dalam pembangunan rumah tahan gempa dan penataan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana. Pengetahuan dan praktik ini menjadi potensi dalam pengembangan standar teknis dan pendekatan pembangunan perumahan yang adaptif terhadap risiko bencana. Dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi NTB dan kabupaten/kota menunjukkan adanya komitmen terhadap peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, termasuk penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni. Komitmen ini menjadi dasar penting dalam memperkuat sinergi program pusat dan daerah.

Provinsi Bali merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan kontribusi signifikan dari sektor pariwisata dan jasa. Aktivitas ekonomi yang tinggi menciptakan kebutuhan besar akan hunian layak, khususnya bagi pekerja sektor pariwisata, UMKM, dan sektor informal, yang sebagian besar merupakan MBR. Bali memiliki praktik tata kelola ruang dan kawasan permukiman yang mengintegrasikan nilai budaya, kearifan lokal, dan pelestarian lingkungan. Pendekatan ini menjadi potensi dalam pengembangan kawasan permukiman berkelanjutan yang selaras dengan prinsip pembangunan hijau sebagaimana diarahkan dalam RPJMN dan Renstra Kementerian PKP. Sebagian besar wilayah Bali telah memiliki infrastruktur dasar permukiman yang relatif baik, seperti akses jalan, air minum, dan sanitasi. Kondisi ini mendukung percepatan peningkatan kualitas kawasan permukiman serta pengembangan perumahan vertikal atau rumah susun sebagai solusi keterbatasan lahan. Pemerintah daerah di Bali pada umumnya memiliki kapasitas fiskal dan kelembagaan yang cukup kuat. Hal ini membuka peluang pengembangan skema kolaborasi pembiayaan, pemanfaatan aset daerah, serta penerapan inovasi penyediaan perumahan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha.

1.2.2 Permasalahan Wilayah NTB dan Bali

Meskipun terdapat capaian pembangunan perumahan pada periode sebelumnya, *Backlog* perumahan dan jumlah rumah tidak layak huni masih menjadi tantangan utama, terutama bagi MBR, pekerja sektor informal, dan masyarakat di wilayah perdesaan, pesisir, serta kawasan rawan bencana. Sebagian besar MBR belum memiliki akses yang memadai terhadap

pembiayaan perumahan formal akibat keterbatasan pendapatan, status pekerjaan, serta keterbatasan literasi keuangan. Kondisi ini memerlukan peran aktif pemerintah dalam penyediaan subsidi, bantuan stimulan, dan skema pembiayaan inovatif. Masih terdapat ketimpangan kualitas kawasan permukiman antara kawasan perkotaan utama dengan kawasan pinggiran, perdesaan, dan kawasan pesisir, baik dari sisi kualitas hunian maupun ketersediaan infrastruktur dasar.

Provinsi NTB merupakan wilayah rawan gempa bumi, banjir, dan kekeringan. Banyak rumah masyarakat yang belum memenuhi standar bangunan tahan bencana, sehingga meningkatkan risiko kerusakan dan kerugian sosial ekonomi ketika terjadi bencana. Di beberapa kabupaten/kota, khususnya wilayah perdesaan dan kepulauan, keterbatasan akses air minum, sanitasi, dan jalan lingkungan masih menjadi kendala utama dalam peningkatan kualitas kawasan permukiman secara menyeluruh. Perbedaan kapasitas perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan program antar pemerintah daerah menyebabkan belum optimalnya integrasi dan kesinambungan program perumahan dan kawasan permukiman.

Permasalahan utama di Provinsi NTB antara lain adalah masih tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan luasnya kawasan permukiman kumuh yang memerlukan intervensi kebijakan dan pembenahan terintegrasi. Data dari pemerintah provinsi menunjukkan bahwa terdapat puluhan ratusan ribu unit rumah yang belum layak huni serta kebutuhan tinggi dalam penanganan permukiman kumuh untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan data Dinas Perkim NTB tahun 2024, jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi NTB masih sangat tinggi, mencapai sekitar 509.000 unit yang masih perlu penanganan. Pemerintah Provinsi NTB juga menargetkan penurunan luasan kawasan kumuh hingga puluhan persen selama lima tahun ke depan melalui penguatan kebijakan, perencanaan, dan kolaborasi antar daerah. Identifikasi awal menunjukkan total permukiman kumuh mencapai 5.508 hektare yang tersebar di berbagai kabupaten/kota berdasarkan SK Pemerintah Daerah di Provinsi NTB.

Provinsi Bali tingginya tekanan terhadap lahan akibat perkembangan pariwisata dan investasi menyebabkan keterbatasan lahan untuk perumahan MBR, khususnya di kawasan perkotaan dan kawasan strategis pariwisata. Urbanisasi dan arus masuk tenaga kerja menyebabkan pertumbuhan permukiman padat dan informal yang berpotensi berkembang menjadi kawasan kumuh apabila tidak ditangani secara terpadu. Harga tanah dan hunian di Bali relatif tinggi, sehingga menyulitkan MBR untuk mengakses perumahan layak tanpa intervensi kebijakan yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah.

Permasalahan utama di Provinsi Bali antara lain masih adanya rumah tidak layak huni (RTLH) serta kawasan permukiman yang memerlukan peningkatan kualitas melalui intervensi kebijakan dan penataan yang terintegrasi. Pemerintah daerah terus melakukan identifikasi dan pemutakhiran data untuk mengetahui kebutuhan penanganan hunian layak serta pengurangan kawasan permukiman kumuh guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Upaya penanganan difokuskan pada penguatan perencanaan, peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan, serta kolaborasi lintas kabupaten/kota dalam rangka menurunkan luasan kawasan kumuh dan mempercepat peningkatan kualitas permukiman secara berkelanjutan di Provinsi Bali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per (data tahun referensi 2024), persentase rumah tangga di Provinsi Bali yang memiliki akses terhadap hunian layak mencapai 85,73%, Ini menempatkan Bali sebagai salah satu provinsi dengan kualitas hunian yang cukup baik di Indonesia. Sedangkan sekitar 14,27% rumah tangga masih memerlukan perbaikan hunian agar memenuhi standar keselamatan dan kesehatan.

Provinsi NTB dan Provinsi Bali memiliki potensi besar berupa dukungan kebijakan nasional, pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, serta komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas permukiman. NTB memiliki ketersediaan lahan yang relatif lebih longgar dan pengalaman pembangunan rumah tahan gempa pasca-bencana, sedangkan Bali memiliki infrastruktur dasar yang relatif baik serta kapasitas fiskal dan kelembagaan yang memadai untuk mendukung inovasi pembiayaan perumahan.

Namun demikian, berbagai permasalahan strategis masih dihadapi, antara lain backlog perumahan, tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), keberadaan kawasan permukiman kumuh, keterbatasan akses pembiayaan bagi MBR, ketimpangan kualitas infrastruktur dasar, serta tekanan terhadap lahan di kawasan perkotaan dan strategis pariwisata. Selain itu, risiko kebencanaan yang tinggi terutama gempa bumi di NTB serta cuaca ekstrem dan banjir di Bali menjadi tantangan serius dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berketahanan. Berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan tersebut, dilakukan analisis SWOT sebagai dasar perumusan arah kebijakan dan strategi.

Strengths (Kekuatan)

1. Posisi wilayah dalam kawasan strategis nasional dan pusat pertumbuhan ekonomi.
2. Dukungan kelembagaan BP3KP Nusa Tenggara I dalam koordinasi lintas daerah.
3. Ketersediaan lahan relatif memadai di NTB untuk pengembangan berbasis kawasan.
4. Pengalaman pembangunan rumah tahan gempa di NTB.
5. Infrastruktur dasar permukiman di Bali relatif baik.
6. Kapasitas fiskal dan tata kelola daerah Bali yang cukup kuat.

Weaknesses (Kelemahan)

1. *Backlog* perumahan dan RTLH masih tinggi, khususnya di NTB.
2. Luasan kawasan kumuh yang memerlukan penanganan terintegrasi.
3. Keterbatasan akses pembiayaan formal bagi MBR.
4. Ketimpangan kualitas permukiman perkotaan dan perdesaan/pesisir.
5. Keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Bali.

Opportunities (Peluang)

1. Pengembangan perumahan MBR dan rumah pekerja di kawasan strategis (KEK, pariwisata).
2. Pengembangan rumah susun/vertikal di kawasan perkotaan Bali.

3. Integrasi pembangunan berbasis mitigasi bencana dan pembangunan hijau.
4. Skema kolaborasi pembiayaan (KPBU, pemanfaatan aset daerah).
5. Sinergi program pusat dan daerah dalam penanganan RTLH dan kumuh.

Threats (Ancaman)

1. Risiko bencana (gempa bumi, banjir, cuaca ekstrem, kekeringan).
2. Urbanisasi dan pertumbuhan permukiman informal.
3. Tekanan investasi dan alih fungsi lahan.
4. Fluktuasi sektor pariwisata yang memengaruhi daya beli masyarakat.
5. Keterbatasan kapasitas fiskal di beberapa daerah.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I merencanakan beberapa strategi untuk menangani kekurangan tersebut dengan menggunakan analisis SWOT.

Strategi SO (Strengths-Opportunity)

1. Pengembangan perumahan MBR dan rumah pekerja terintegrasi di kawasan strategis nasional dan pariwisata.
2. Replikasi model rumah tahan gempa sebagai standar pembangunan regional.
3. Optimalisasi skema KPBU dan kolaborasi pembiayaan untuk penyediaan hunian terjangkau.
4. Pengembangan perumahan vertikal di Bali berbasis prinsip pembangunan hijau dan efisiensi lahan.

Strategi WO (Weakness - Opportunity)

1. Percepatan penanganan RTLH dan kawasan kumuh melalui integrasi program pusat dan daerah.
2. Penguatan skema subsidi dan pembiayaan inovatif bagi MBR, termasuk pekerja sektor informal.
3. Peningkatan kapasitas perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
4. Pengembangan sistem data terintegrasi backlog, RTLH, dan kawasan kumuh.

Strategi ST (Strength - Threat)

1. Penguatan standar teknis bangunan tahan bencana dan regulasi pengendalian tata ruang.
2. Penataan kawasan berbasis mitigasi risiko bencana.
3. Diversifikasi sumber pembiayaan perumahan untuk menjaga keberlanjutan program.
4. Perlindungan lahan untuk hunian MBR melalui kebijakan pengendalian alih fungsi.

Strategi WT (Weaknes - Thread)

1. Prioritisasi intervensi di kawasan rawan bencana dan kumuh ekstrem.
2. Program peningkatan kualitas rumah berbasis pemberdayaan masyarakat.
3. Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas daerah dalam penanganan kawasan permukiman.
4. Penajaman kebijakan afirmatif bagi MBR untuk mengurangi ketimpangan akses hunian.

Secara keseluruhan, hasil analisis SWOT ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi BP3KP Nusa Tenggara I periode Renstra, dengan fokus pada percepatan pengurangan backlog dan RTLH, peningkatan kualitas kawasan permukiman, serta penguatan ketahanan hunian terhadap risiko bencana dan tekanan perkembangan wilayah.

1.2.3 Implikasi terhadap Peran BP3KP Nusa Tenggara I

Potensi dan permasalahan tersebut menegaskan urgensi peran BP3KP Nusa Tenggara I sebagai perpanjangan tangan Kementerian PKP dalam:

1. memperkuat koordinasi dan sinkronisasi program pusat–daerah,
2. mendorong pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang responsif terhadap karakteristik wilayah,
3. mempercepat penanganan *Backlog* dan kawasan kumuh,
4. serta memastikan penerapan standar teknis, prinsip keberlanjutan, dan mitigasi bencana.

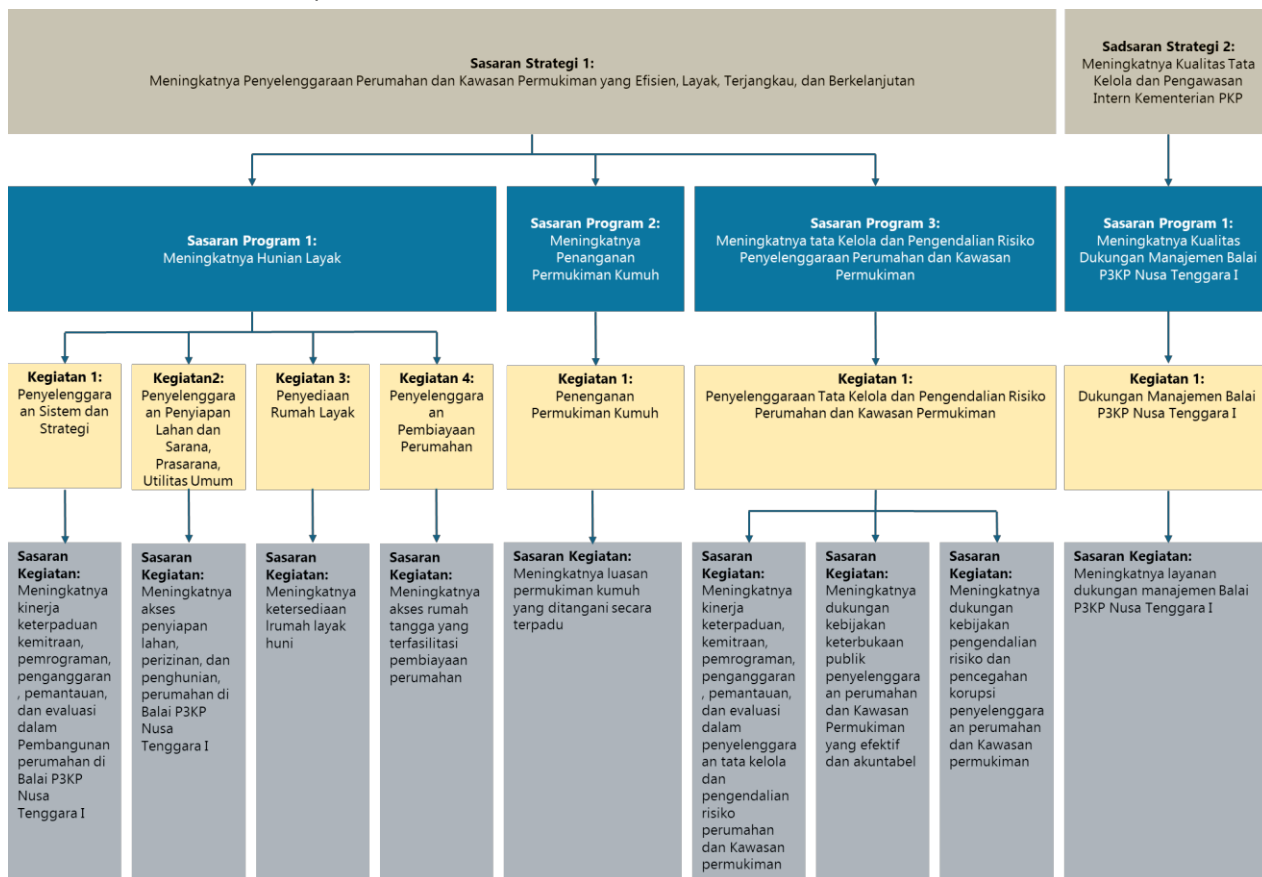
2.1 TUJUAN BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I

Mengacu pada arah kebijakan nasional dan tujuan Kementerian Perumahan dan Permukiman dalam Rencana Strategis Kementerian PKP Tahun 2025-2029, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I merumuskan tujuan organisasi yang menjadi landasan operasional pelaksanaan program perumahan dan permukiman di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan pertama yaitu "Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif". Dengan indikator tujuan sebagai berikut:
 - a. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru;
 - b. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas;
 - c. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - d. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu;
 - e. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas hunian vertikal;
 - f. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui fasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau;
 - g. Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
 - h. Persentase terwujudnya tata kelola hunian publik, privat, dan perlindungan konsumen;
2. Tujuan kedua yaitu Peningkatan kualitas tata kelola, dengan indikator tujuan adalah persentase peningkatan tata kelola pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2.2 SASARAN PROGRAM BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA I

Mengacu pada Sasaran Strategis Renstra Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan dalam tujuan SS-1 (Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan) dan SS-2 (Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP).



Gambar 2. 1 Pohon Kinerja BP3KP Nusa Tenggara I

Sasaran Program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan Balai dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah kerja.

Berdasarkan Sasaran Strategis tersebut, Sasaran Program Balai P3KP Nusa Tenggara I adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Hunian Layak, yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan yaitu Penyelenggaraan Sistem dan Strategi, Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Saran, Utilitas Umum, Penyediaan Layak Huni dan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan.
2. Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh, dengan kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh.

3. Meningkatnya Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan kegiatan Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai, dengan kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Balai.

Berdasarkan Sasaran Program di atas, disusunlah kegiatan, sasaran kegiatan dan indikator kinerja Balai P3KP Nusa Tenggara I Tahun 2025-2029, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
Meningkatnya Hunian Layak	Penyelenggaraan Sistem dan Strategi	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai P3KP Nusa Tenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni; 2. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di Balai P3KP Nusa Tenggara I; 3. Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di Balai P3KP Nusa Tenggara I.
	Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai P3KP Nusa Tenggara I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi penyiapan lahan serta PSU; 2. Persentase rumah yang mendapat Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum; 3. Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana

Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
			dan utilitas umum hunian vertikal;
	Penyediaan Rumah Layak Huni	Meningkatnya ketersediaan layak huni	1. Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas; 2. Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru; 3. Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi peningkatan kualitas rumah dan pengembangan Kawasan permukiman.
	Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan	Persentase rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan yang terjangkau
Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	Penanganan Permukiman Kumuh	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu
Meningkatnya Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman
		Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan	Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
		kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	yang efektif dan akuntabel permukiman
		Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman	Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai P3KP Nusa Tenggara I	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Balai P3KP Nusa Tenggara I	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai P3KP Nusa Tenggara I	Tingkat layanan dukungan manajemen Balai P3KP Nusa Tenggara I

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Entitas Unit Organisasi

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, diperlukan arah kebijakan dan strategi yang terintegrasi pada seluruh entitas unit organisasi. Setiap unit organisasi memiliki peran, fungsi, dan mandat strategis yang saling melengkapi dalam mewujudkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, terjangkau, berkelanjutan, serta dikelola secara efektif dan akuntabel.

Kementerian PKP melalui enam unit organisasi, yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, serta Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, menjalankan peran strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Arah kebijakan dan strategi pada masing-masing unit organisasi selanjutnya dijabarkan untuk memberikan fokus, prioritas, serta pendekatan pelaksanaan yang selaras dengan sasaran strategis kementerian.

1. Arah Kebijakan dan Strategi dalam Program Perumahan dan Kawasan Permukiman secara umum pada Unit Organisasi adalah sebagai berikut:
 - a) Peningkatan Akses dan Ketersediaan Hunian Layak bagi Masyarakat
 - b) Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan yang Inovatif dan Inklusif
 - c) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Secara Terpadu
 - d) Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Pengembangan Hunian Terpadu
 - e) Penguatan Tata Kelola, Regulasi, dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan
 - f) Penguatan Kolaborasi, Kelembagaan, dan Kapasitas Pemangku Kepentingan
 - g) Pemanfaatan Inovasi Teknologi dan Sistem Informasi Perumahan Terintegrasi

2. Arah Kebijakan dan Strategi dalam Program Dukungan Manajemen secara umum pada Unit Organisasi Kementerian PKP adalah sebagai berikut:
 - a) Penguatan Perencanaan dan Penganggaran,

- b) Transformasi Digital dan Tata Kelola,
- c) Penguatan Sumber Daya Manusia
- d) Penguatan Sistem Informasi dan Data
- e) Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen
- f) Percepatan Regulasi dan Advokasi Hukum
- g) Modernisasi dan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan BMN
- h) Penguatan Sistem dan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa
- i) Penguatan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik
- j) Kolaborasi dan Pendanaan Alternatif

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I

Dalam rangka menjamin keterpaduan dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, arah kebijakan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman disusun dengan selaras dan harmonis dengan arah kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman di daerah, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan terintegrasi, saling mendukung, dan berkelanjutan. sesuai dengan arah kebijakan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2025–2029 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMN 2025–2029 serta selaras dengan RPJMD Provinsi NTB 2025–2029, khususnya Misi Keenam dengan tujuan terwujudnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah yang berwawasan lingkungan. Dalam konteks ini, sektor perumahan dan kawasan permukiman diposisikan sebagai fondasi penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus penguatan struktur ruang wilayah.

Strategi utama yang ditempuh Pemerintah Provinsi NTB diarahkan pada peningkatan ketersediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kelompok rentan, melalui fasilitasi pembangunan rumah yang layak, aman, dan terjangkau. Kebijakan ini juga mencakup penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat terdampak bencana serta relokasi akibat program pemerintah, sejalan dengan karakteristik NTB sebagai wilayah rawan bencana. Selain itu, arah kebijakan difokuskan pada penanganan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Upaya ini dilakukan melalui revitalisasi kawasan, pencegahan tumbuhnya kekumuhan baru, serta peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) seperti air minum, sanitasi, persampahan, dan akses jalan lingkungan.

Dalam kerangka penataan ruang, kebijakan perumahan dan permukiman di NTB diintegrasikan dengan pengembangan wilayah dan pelayanan dasar, guna mendukung pola ruang yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan permukiman baru terintegrasi di kawasan strategis seperti Mataram Raya, Lombok Tengah (Praya), dan Sumbawa, serta penguatan konektivitas antar wilayah. Seluruh kebijakan tersebut didukung oleh program prioritas RTRW Provinsi NTB periode 2025–2029, antara lain percepatan konektivitas wilayah, peningkatan ketahanan infrastruktur dasar dan

pelayanan publik, serta perlindungan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana, sehingga pembangunan permukiman tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan ketahanan wilayah.

Sesuai dengan arah kebijakan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Bali periode 2025–2029 dirumuskan dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Bali 2025–2029, khususnya Misi Kedelapan Belas, yang menekankan pada pemenuhan infrastruktur dasar secara berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, sektor perumahan dan kawasan permukiman menjadi instrumen penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan pembangunan di tengah tekanan urbanisasi dan pariwisata.

Strategi kebijakan Pemerintah Provinsi Bali difokuskan pada pemenuhan rumah layak huni bagi warga negara yang terdampak bencana maupun relokasi akibat program pemerintah daerah, dengan target capaian yang konsisten hingga tahun 2030. Hal ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memastikan perlindungan sosial dan kepastian hunian bagi masyarakat rentan. Di sisi lain, kebijakan juga diarahkan pada pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh secara bertahap dan terukur, melalui intervensi peningkatan kualitas lingkungan permukiman, penataan kawasan, serta penguatan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada fisik kawasan, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi Bali mendorong peningkatan cakupan kawasan permukiman yang dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Penyediaan PSU menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas permukiman, mendukung kesehatan lingkungan, serta memperkuat daya dukung wilayah, khususnya di kawasan padat penduduk dan wilayah penyangga destinasi pariwisata. Secara umum, arah kebijakan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Bali menekankan pada keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan hunian, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, dan keberlanjutan ruang wilayah, sehingga pembangunan perumahan tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menjaga karakter, daya dukung, dan kelestarian Pulau Bali.

Mengacu pada arah kebijakan dan strategi unit organisasi di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan memperhatikan arah kebijakan pemerintah daerah serta memperhatikan mandat fungsi Balai sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, memiliki peran strategis dalam menjembatani kebijakan nasional dan implementasi pembangunan perumahan serta kawasan permukiman di daerah. Arah kebijakan BP3KP Nusa Tenggara I disusun untuk memastikan keselarasan antara sasaran RPJMN 2025–2029, Rencana Strategis Kementerian PKP, arah kebijakan unit organisasi eselon I, serta prioritas pembangunan di Wilayah Kerja, arah kebijakan BP3KP Nusa Tenggara I adalah Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang inklusif dan kolaboratif. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui 4 strategi utama sesuai dengan strategi kementerian PKP sebagai berikut:

3.2.1 Mengoptimalkan penyelenggaraan akses perumahan yang layak dan terjangkau melalui penyediaan rumah swadaya, rumah khusus, dan rumah susun, serta mendukung penyediaan PSU perumahan sesuai standar teknis dan kebutuhan wilayah.

- Fasilitasi dan dukungan teknis pembangunan rumah susun dan hunian vertikal, terutama bagi MBR.
- Dukungan penyediaan rumah khusus, terutama bagi masyarakat terdampak bencana, mendukung pariwisata daerah, dan kawasan khusus lainnya, serta untuk mendukung program strategis pemerintah;
- Penguatan penyelenggaraan perumahan swadaya, khususnya melalui bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;
- Fasilitasi penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR, perumahan bersubsidi, perumahan skala besar, serta perumahan yang dibangun secara berbasis komunitas dan swadaya masyarakat;

3.2.2 Mengoptimalkan penanganan permukiman kumuh yang terpadu secara kolaboratif, melalui dukungan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sanitasi rumah serta penyediaan akses air minum layak.

- Pendampingan dan penguatan Pemerintah Daerah dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman terpadu.
- Fasilitasi penanganan permukiman kumuh melalui pembangunan infrastruktur kawasan permukiman, yang meliputi rumah, jalan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan, dan proteksi kebakaran.

3.2.3 Penguatan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel dan berintegritas. melalui penguatan ekosistem penyelenggaraan perumahan dan optimalisasi peran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Upaya yang dilakukan meliputi :

- Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pembiayaan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyediaan perumahan;
- Pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dalam percepatan implementasi kebijakan nasional, khususnya terkait kemudahan perizinan pembangunan perumahan dan penyederhanaan proses layanan;

- Fasilitasi implementasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerah agar selaras dengan kebijakan nasional;
- Penguatan penerapan standar keselamatan bangunan, ketahanan bencana, serta kesehatan lingkungan hunian;
- Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pembinaan dan pendampingan;
- Penguatan perlindungan konsumen dan kepastian berusaha bagi pengembang perumahan dalam rangka menciptakan iklim penyediaan perumahan yang sehat dan berkelanjutan.

3.2.4 Penguatan kualitas tata kelola. Berfokus pada penguatan kapasitas internal BP3KP Nusa Tenggara I untuk mendukung tujuan Kementerian dalam mencapai kualitas tata kelola yang tinggi.

- Penguatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan teknis program.
- Penguatan koordinasi dan Reformasi Birokrasi, Pembangunan Zona Integritas, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Manajemen Risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyusunan.

3.3 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan BP3KP Nusa Tenggara I dirumuskan untuk memastikan unit pelaksana teknis (UPT) ini memiliki struktur, fungsi, tata laksana, dan sumber daya manusia yang adaptif, terintegrasi, dan mampu mencapai Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), terutama dalam mendukung Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah.

3.3.1 Reposisi Kelembagaan dan Pembentukan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I di bawah Kementerian PKP

Pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 melalui kebijakan 8 Asta Cita menempatkan pembangunan berbasis kewilayahan sebagai prioritas utama. Secara khusus, Asta Cita keenam menekankan pentingnya pembangunan dari tingkat desa dan akar rumput guna mengakselerasi pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan. Dalam konteks ini, sektor perumahan dan permukiman menjadi instrumen strategis untuk mereduksi ketimpangan spasial. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan menjadi krusial untuk menjamin integrasi kebijakan penyediaan hunian layak yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat koordinasi penyelenggaraan perumahan yang terpadu, Pemerintah telah menetapkan pembentukan

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) pada tahun 2024. Transformasi kelembagaan ini merupakan langkah strategis untuk menjamin kesinambungan serta integrasi kebijakan antara penyediaan hunian dan pengembangan kawasan permukiman yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Kementerian PKP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029, dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sedangkan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I sebagai unit organisasi di bawah Kementerian PKP dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Reposisi kelembagaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta memperkuat peran UPT sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Dalam konteks tersebut, Balai yang sebelumnya bernama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I direposisi menjadi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Nusa Tenggara I. Reposisi ini tidak hanya bersifat nomenklatural, tetapi juga mencerminkan perluasan mandat, fungsi, serta cakupan wilayah kerja.

Salah satu perubahan fundamental adalah perluasan wilayah kerja, sebelumnya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I hanya memiliki kewenangan wilayah kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), setelah reposisi BP3KP Nusa Tenggara I memiliki wilayah kerja yang mencakup Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali, dengan lokasi balai tetap berkedudukan di Lombok Barat Provinsi NTB. Perluasan wilayah ini menegaskan peran BP3KP Nusa Tenggara I sebagai UPT regional yang menangani lebih dari satu provinsi, sekaligus memperkuat koordinasi lintas wilayah dalam penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman. Pada kelembagaan sebelumnya, fokus tugas Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan lebih menitikberatkan pada penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan. Setelah reposisi menjadi BP3KP, tugas balai diperluas secara signifikan, balai tidak lagi hanya berfokus pada unit rumah, tetapi juga pada penataan kawasan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Reposisi kelembagaan juga membawa penguatan dan penambahan fungsi, antara lain:

1. **Perencanaan dan teknis kawasan permukiman**, termasuk penyusunan program, anggaran, dan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman.
2. **Pelaksanaan dan pengendalian teknis** pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).

3. **Koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah**, khususnya dalam penyediaan lahan, penghunian perumahan, dan pemanfaatan aset.
4. **Pemantauan, evaluasi, serta pengelolaan data dan informasi** perumahan dan kawasan permukiman sebagai dasar perumusan kebijakan.
5. **Fasilitasi pembiayaan perumahan, bina usaha, dan perlindungan konsumen**, yang sebelumnya belum menjadi fungsi dominan balai.
6. **Dukungan penataan kawasan pasca bencana dan kerusuhan sosial**, sebagai bagian dari respon cepat pemerintah pusat di daerah.

Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan pergeseran peran balai dari sekadar pelaksana teknis pembangunan fisik menjadi simpul koordinasi, fasilitasi, dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

3.3.2 Tugas dan Fungsi BP3KP Nusa Tenggara I

BP3KP Nusa Tenggara I bertransformasi dari entitas sebelumnya (BP2P Nusa Tenggara I di bawah Ditjen Perumahan, Kementerian PUPR) menjadi UPT di bawah Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (Ditjen KP), Kementerian PKP, dengan wilayah kerja meliputi Provinsi NTB dan Bali. BP3KP Nusa Tenggara I memiliki tugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial, dan fasilitasi serah terima aset. Dalam melaksanakan tugas tersebut, diselenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- b. penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- c. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- d. pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- g. pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
- h. pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- j. pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- k. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;

- l. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- m. pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- n. pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuaan; dan
- o. pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

Sebagai unit pelaksana di wilayah kerja Provinsi NTB dan Bali, BP3KP Nusa Tenggara I berperan strategis dalam memperkuat kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar mampu menjalankan fungsi penyelenggaraan kawasan permukiman secara efektif. melalui pembinaan, fasilitasi teknis, pendampingan program, serta koordinasi lintas sektor, BP3KP Nusa Tenggara I memastikan bahwa kebijakan, standar, dan regulasi nasional dapat diterapkan secara konsisten di Provinsi NTB dan Bali.

3.3.3 Struktur Organisasi yang Diperlukan

BP3KP Nusa Tenggara I bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman serta berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, sebagaimana ditunjukkan dalam struktur organisasi. Melalui peran koordinatif ini, BP3KP Nusa Tenggara I menjadi penghubung penting antara kebijakan pusat dan implementasi daerah, sehingga penyelenggaraan kawasan permukiman dapat berlangsung lebih terarah, berkualitas, dan berkelanjutan di Provinsi NTB dan Bali. Struktur BP3KP Nusa Tenggara I yang berkedudukan sebagai UPT di bawah Ditjen Kawasan Permukiman harus dirancang ramping namun efektif, terdiri dari:

- a) **Kepala Balai:** Penanggung jawab utama pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi BP3KP di wilayah Nusa Tenggara I.
- b) **Subagian Umum dan Tata Usaha:** Bertugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.
- c) **Seksi Pelaksanaan Wilayah I:** Bertugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial; dan melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan

dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai deliniasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

- d) **Seksi Pelaksanaan Wilayah II:** Bertugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai deliniasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.
- e) **Jabatan Fungsional dan Pelaksana:** Meliputi fungsional teknis spesifik (seperti Penata Kelola Perumahan, Perekrayasa, Analis Keuangan APBN, dan Surveyor Pemetaan) dan pelaksana yang bertugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



Gambar 3 Diagram SOTK UPT di Kementerian PKP

Sumber: PermenPKP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

3.3.4 Tata Laksana Internal dan Eksternal

Pencapaian sasaran BP3KP Nusa Tenggara I sangat bergantung pada tata laksana yang terintegrasi, baik secara internal dalam Kementerian PKP maupun kolaboratif dengan pemangku kepentingan eksternal di tingkat regional.

a) Tata Laksana Internal (Hubungan Antarunit Organisasi Kementerian)

BP3KP Nusa Tenggara I memiliki hubungan komando (garis komando) langsung dengan Ditjen Kawasan Permukiman (Ditjen KP). Selain itu, BP3KP Nusa Tenggara I juga memiliki jalur koordinasi (garis koordinasi) dengan:

- 1) **Sekretariat Jenderal (Setjen):** Untuk urusan administrasi, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga.

- 2) **Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan (Ditjen Perdesaan) dan Ditjen Perumahan Perkotaan (Ditjen Perkotaan):** Untuk sinergi dan integrasi program perumahan, mengingat BP3KP melaksanakan program yang relevan dengan kedua Ditjen tersebut di lapangan.
- 3) **Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (Ditjen TKPR):** Untuk implementasi dan penguatan sistem manajemen risiko, kepatuhan internal, dan pencegahan korupsi.

b) Tata Laksana Eksternal (Kolaborasi dan Tata Kelola Data)

Tata laksana eksternal harus difokuskan pada penguatan kolaborasi Quadruple Helix (Pemerintah Pusat/Daerah, Swasta, Akademisi, dan Masyarakat) dan penggunaan sistem data terpadu:

- 1) **Pemerintah Daerah (Pemda):** BP3KP memfasilitasi koordinasi dan sinergi program dengan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota. Mekanisme kolaborasi pendanaan (collaborative funding) harus dioptimalkan, mencakup APBN, APBD, CSR/TJSLP, dan Dana Desa, untuk mengatasi keterbatasan APBN.
- 2) **Kemitraan Kelembagaan:** Memperkuat peran Pokja PKP dan Forum PKP di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Forum ini digunakan untuk menyinkronkan data RTLH dan alokasi anggaran, mencegah tumpang tindih program, serta mengaktifkan peran swasta dalam penyediaan hunian, terutama melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
- 3) **Penggunaan Data Terpadu:** Memastikan semua intervensi program, terutama BSBS dan fasilitasi pembiayaan, menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) BPS untuk menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat, karena ini merupakan potensi penting dalam perumusan kebijakan berbasis data. BP3KP harus mendukung Sistem Informasi Tata Kelola Bantuan Perumahan (SIBARU) dan sistem digital lainnya.
- 4) **Kepatuhan Hukum:** Bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan instansi pertanahan untuk memastikan penegakan kebijakan hunian berimbang dan perlindungan konsumen perumahan, serta mengamankan lahan untuk pembangunan Rusun/Rusus.

3.3.5 Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

BP3KP Nusa Tenggara I memiliki jumlah pegawai secara keseluruhan sebanyak 106 pegawai, dengan jumlah PNS, PPPK, dan CPNS sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Jumlah Pegawai pada BP3KP Nusa Tenggara 1 Berdasarkan Klasifikasi

No	Sub	Total	Pegawai		Gender	
			PNS	PPPK	L	P
1	Balai P3KP Nusa Tenggara I	37	22	15	24	14
2	Satker PKP Prov. NTB	29	16	13	12	17

No	Sub	Total	Pegawai		Gender	
			PNS	PPPK	L	P
3	Satker PKP Prov. Bali	40	12	28	24	15
Total		106	50	56	60	46

Sebaran pegawai BP3KP Nusa Tenggara I berdasarkan status kepegawaian dengan persentase terbesar PPPK sebanyak 53%, sementara CPNS sebanyak 27%, dan PNS 20%. Sebaran pegawai berdasarkan gender dapat dikategorikan tersebar secara proporsional yaitu pegawai laki-laki sebesar 56% dan 43% diantaranya perempuan.

Tabel 3. 2 Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan pada BP3KP Nusa Tenggara I

No	Jabatan	Total	Pegawai	
			PNS	PPPK
1	Eselon 3	1	1	0
2	Eselon 4	3	3	0
3	JF PKBG Ahli Madya	1	1	0
4	JF PKP Ahli Muda	4	4	0
5	JF PKBGKP Ahli Muda	2	2	0
6	JF PKP Ahli Pertama	28	15	13
7	JF PKBG Ahli Pertama	17	12	5
8	JF PK APBN Penyelia	1	1	0
9	JF APK APBN Ahli Pertama	3	3	0
10	JF Arsiparis Ahli Pertama	9	2	7
11	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	3	2	1
12	JF Pranata Komputer Terampil	1	0	1
13	JF TBP Ahli Pertama	2	0	2
14	JF Analis SDM Ahli Pertama	1	0	1
15	Pelaksana	29	4	25
Total		105	50	55

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi balai, berdasarkan ketersediaan jabatan yang ada dan sesuai peta dan analisa jabatan, seluruh tugas dan fungsi balai dapat dilaksanakan.

Sementara itu proporsi jumlah pegawai BP3KP Nusa Tenggara I berdasarkan satuan kerja dan pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Jumlah Pegawai BP3KP Nusa Tenggara I Berdasarkan Satuan Kerja dan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	Teknik (orang)		Non Teknik (orang)	
			L	P	L	P
Balai P3KP Nusa Tenggara I						
1	Pasca Sarjana/S2	3	1	1	0	1
2	Sarjana/S1	30	12	6	7	5
3	Diploma III/D3	0	0	0	0	0
4	SMA / SLTA	4	0	0	3	1
	Total	37	13	7	10	7
Satuan Kerja PKP Provinsi NTB						
1	Pasca Sarjana/S2	1	0	1	0	0
2	Sarjana/S1	23	6	8	4	5
3	Diploma III/D3	2	0	0	1	1
4	SMA / SLTA	3	0	0	1	2
	Total	29	6	9	6	8
Satuan Kerja PKP Provinsi Bali						
1	Pasca Sarjana/S2	4	2	1	0	1
2	Sarjana/S1	20	6	4	5	5
3	Diploma III/D3	0	0	0	0	0
4	SMA / SLTA	16	0	0	12	4
5	Total	40	8	5	17	10

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Balai P3KP Nusa Tenggara I memperhatikan strategi pengelolaan SDM yang berfokus pada peningkatan kompetensi dan profesionalisme berbasis sistem merit, melalui:

- a) **Program Peningkatan Kompetensi:** Melaksanakan program penguatan kompetensi secara berjenjang (Kepemimpinan, Strategis, Manajerial, dan Operasional). Bagi staf operasional/pelaksana di lapangan (yang melaksanakan program inti BSPS, Rusun, PSU), pelatihan harus ditekankan pada penguatan teknis di bidang desain permukiman, teknologi rumah sederhana (seperti RUSPIN), pengawasan fisik, dan pelaporan program.
- b) **Sistem Tata Kelola SDM:** Memanfaatkan sistem informasi aparatur sipil negara (SIASN) untuk mendukung transformasi digital SDM. Mengembangkan manajemen

talenta ASN, pemetaan karier, dan pelatihan berbasis kompetensi untuk mengisi posisi-posisi kunci.

- c) **Mitigasi Risiko Kelembagaan:** Menerbitkan SOP untuk setiap proses bisnis Balai (seperti pengadaan barang/jasa, BSPS, dan serah terima aset) dan mengurangi dominasi tenaga non-permanen. Peningkatan ini vital untuk meminimalkan risiko operasional akibat pergantian personel dan menjaga kualitas kinerja Balai dalam kategori Baik.
- d) **Integritas:** Mempertahankan dan meningkatkan skor Indeks Integritas Kementerian (target 83 pada 2029) dan memastikan budaya integritas diterapkan, didukung dengan status pengelolaan keuangan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang telah dicapai

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**4.1 Target Kinerja**

Target kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I merupakan representasi capaian sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan yang dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman secara berkelanjutan. Target kinerja tersebut mencerminkan tingkat hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) yang diharapkan dapat dicapai oleh Balai P3KP Nusa Tenggara I melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam periode perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Perumusan target kinerja Balai P3KP Nusa Tenggara I dilakukan secara terintegrasi dengan arah kebijakan dan target strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta mempertimbangkan dinamika dan kebutuhan wilayah kerja Balai. Dalam konteks ini, target kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja, tetapi juga sebagai instrumen pengarah pelaksanaan program dan kegiatan agar selaras dengan prioritas nasional dan kebijakan sektoral perumahan dan kawasan permukiman.

Penyusunan target kinerja Balai P3KP Nusa Tenggara I didasarkan pada prinsip kejelasan, keterukuran, dan keberlanjutan, dengan memperhatikan keterkaitan antara indikator kinerja, sasaran strategis, serta kapasitas pelaksanaan. Target dirumuskan dalam bentuk kuantitatif dengan satuan ukur yang jelas, ditetapkan secara logis berdasarkan kondisi awal (*baseline*) yang terukur, serta relevan dengan indikator kinerja yang digunakan. Pendekatan ini memastikan bahwa target kinerja yang ditetapkan bersifat realistis namun tetap mendorong peningkatan kinerja secara bertahap dan berkelanjutan sepanjang periode Renstra Balai. Target kinerja kegiatan BP3KP Nusa Tenggara I adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Rekapitulasi Target Kinerja Balai P3KP Nusa Tenggara I 2025-2029

SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/KEGIATAN/<i>OUTPUT</i> KEGIATAN	2025-2029
Meningkatnya Hunian Layak	
Penyelenggaraan Sistem dan Strategi	
Rekomendasi Kebijakan	13 Rekomendasi Kebijakan
Data dan Informasi	8 Dokumen
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	30 Laporan
Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum	
Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	1.924 Unit
Dukungan Teknis	11 Laporan
Kebijakan Program Anggaran dan Rencana Teknis	4 Rekomendasi Kebijakan
Penyediaan Rumah Layak Huni	
Pembangunan rumah swadaya	36.313 Unit
Pembangunan rumah khusus	3.196 Unit
Pembangunan rumah susun	484 Unit
Pelaporan Dokumen Teknis	13 Laporan
Rekomendasi kebijakan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	16 Rekomendasi Kebijakan
Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	
kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan	4 Rekomendasi Kebijakan
Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	
Penanganan Permukiman Kumuh	
Penanganan Permukiman Kumuh	55 Hektar
Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	
Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	4 Laporan
Pembangunan dan Penerapan Zona Integritas	5 Rekomendasi Kebijakan
Penerapan Manajemen Risiko dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuaan	9 Rekomendasi Kebijakan

SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/KEGIATAN/ <i>OUTPUT</i> KEGIATAN	2025-2029
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I	
Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I	
Layanan Perkantoran	15 Layanan
Layanan Umum	47 Layanan
Layanan Sarana Internal	15 Layanan
Layanan Data dan Informasi	12 Layanan
Layanan BMN	8 Layanan
Layanan Reformasi Kinerja	12 Layanan

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I dalam rangka pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029 bidang perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Provinsi NTB dan Provinsi Bali, maka kebutuhan pendanaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I dengan rancangan pendanaan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 5 Rekapitulasi Target Kinerja Balai P3KP Nusa Tenggara I 2025-2029

SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/KEGIATAN/<i>OUTPUT</i> KEGIATAN	2025-2029 (Rp. Juta)
Meningkatnya Hunian Layak	
Penyelenggaraan Sistem dan Strategi	10.041
Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum	35.440
Penyediaan Rumah Layak Huni	3.465.516
Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	347
Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	
Penanganan Permukiman Kumuh	124.700
Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	
Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.590
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I	
Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I	197.179
Jumlah	3.836.813

Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Tahun 2025–2029 disusun sebagai instrumen perencanaan jangka menengah untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Balai P3KP Nusa Tenggara I dalam mengimplementasikan visi, misi, serta sasaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan kewenangan dan wilayah kerja Balai.

Pencapaian sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis ini memerlukan penguatan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta keterlibatan dunia usaha dan masyarakat. Pendekatan kolaboratif tersebut diperlukan agar seluruh sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal guna mencapai kinerja penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif, merata, dan berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai target sasaran Renstra Balai P3KP Nusa Tenggara I Tahun 2025–2029, dibutuhkan dukungan pendanaan yang memadai. Oleh karena itu, Balai mendorong penguatan kemitraan antara pemerintah dan swasta serta pengembangan alternatif pembiayaan pembangunan perumahan rakyat. Upaya tersebut dilengkapi dengan pemberian berbagai insentif oleh Pemerintah untuk mendorong partisipasi swasta dan masyarakat dalam penyediaan hunian layak, baik melalui dukungan prasarana, sarana, dan utilitas umum, maupun melalui skema bantuan stimulan perumahan swadaya.

Di samping aspek pendanaan, balai perlu mendorong implementasi teknologi konstruksi inovatif yang efisien, cepat, dan adaptif terhadap risiko bencana, seperti sistem pra-cetak RUSPIN (Rumah Unggul Sistem Panel Instan) dan RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat). Penggunaan teknologi tersebut terbukti lebih unggul dalam aspek kecepatan pembangunan, efisiensi biaya, serta ketahanan struktur dibandingkan metode konvensional, sehingga sangat relevan untuk wilayah rawan bencana, terutama di Provinsi NTB dan Bali. Penerapan inovasi teknologi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu bangunan dan keberlanjutan hunian yang dibangun melalui program pemerintah.

Penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel juga menjadi pilar utama pelaksanaan Renstra. Hal ini mencakup pengamanan integritas program, pengendalian risiko penyimpangan, serta memastikan integrasi data calon penerima bantuan dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna menjamin ketepatan sasaran dan menghindari duplikasi bantuan. Konsistensi data dan ketepatan formulasi perhitungan indikator kinerja yang telah ditetapkan harus dijaga secara ketat sebagai bagian dari sistem pengendalian internal yang andal. Mekanisme pengukuran capaian kinerja BP3KP Nusa

Tenggara I akan didasarkan pada hasil pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur dan terintegrasi. IKU tersebut dijabarkan secara rinci dalam Rencana Kinerja (Renja) tahunan dan dilaporkan secara periodik melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP tahunan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban publik, tetapi juga sebagai sarana evaluasi dan umpan balik strategis untuk perbaikan berkelanjutan serta penentuan langkah korektif yang konstruktif sepanjang periode Renstra.

Renstra ini diharapkan menjadi instrumen pengarah yang memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan dilaksanakan secara konsisten, terukur, tepat sasaran, serta berkelanjutan, guna mewujudkan hunian yang layak, aman, tangguh terhadap bencana, dan berkeadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, melalui penyediaan rumah baru layak huni yang didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai, peningkatan kepastian hukum dalam bermukim, serta peningkatan kualitas perumahan secara menyeluruh. Dengan penerapan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, transparan, dan akuntabel, diharapkan penyelenggaraan pembangunan perumahan dapat berjalan secara optimal sehingga pemenuhan hunian layak sebagai hak dasar masyarakat semakin terjamin.

Pelaksanaan Rencana Strategis Balai P3KP Nusa Tenggara I Tahun 2025–2029 secara konsisten, dengan dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, diharapkan mampu mempercepat penyediaan rumah layak huni yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebagai bagian dari proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, penguatan koordinasi dan integrasi, baik secara vertikal maupun horizontal, menjadi prasyarat utama dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan rakyat di wilayah kerja Balai.

Rencana Strategis ini bersifat dinamis dan terbuka untuk disempurnakan seiring dengan perkembangan lingkungan strategis. Hal tersebut sejalan dengan prinsip perencanaan pembangunan nasional yang sistematis dan berkelanjutan, sehingga Renstra Balai P3KP Nusa Tenggara I tetap adaptif terhadap perubahan kebijakan, kebutuhan, dan tantangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman ke depan.

LAMPIRAN I

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI P3KP NUSA TENGGARA I

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)						
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									162.633.556,680	818.906.777,631	759.149.085,392	928.560.211,555	970.384.598,395	3.639.634.229,654	
SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan															
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS:															
1	Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi														
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Hunian Layak															
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi									528.989,520	2.193.741,580	2.312.203,620	2.437.062,617	2.568.663,999	10.040.661,336	
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I															
OUTPUT KEGIATAN:															
	1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	50.000,000	175.000,000	184.450,000	194.410,300	204.908,456	808.768,756
	2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	60.000,000	63.240,000	66.654,960	70.254,330	260.149,290

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
3	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	3	-	-	-	-	3	145.788,520	-	-	-	-	145.788,520
4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	32.631,580	34.393,680	36.250,940	38.208,490	141.484,690
5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Kegiatan	1	-	-	-	-	1	184.597,000	-	-	-	-	184.597,000
6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	375.531,000	395.809,674	417.183,396	439.711,300	1.628.235,370
7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	310.128,000	326.874,912	344.526,157	363.130,570	1.344.659,639
8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan	2	2	2	2	2	10	148.604,000	785.451,000	827.865,354	872.570,083	919.688,868	3.554.179,305
9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	175.000,000	184.450,000	194.410,300	204.908,456	758.768,756
10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan	-	3	3	3	3	12	-	280.000,000	295.120,000	311.056,480	327.853,530	1.214.030,010
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum									-	8.201.436,401	8.633.390,668	9.040.778,348	9.564.314,568	35.439.919,986

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)						
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I															
OUTPUT KEGIATAN:															
	1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit	-	481	481	481	481	1.924	-	7.049.985,401	7.330.861,314	7.667.912,409	8.117.313,869	30.166.072,993
	2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dokumen	-	-	1	1	1	3	-	-	88.900,000	93.700,600	98.760,432	281.361,032
	4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	966.451,000	1.018.639,354	1.073.645,879	1.131.622,757	4.190.358,990
	5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	90.000,000	94.860,000	99.982,440	105.381,492	390.223,932
	6	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	95.000,000	100.130,000	105.537,020	111.236,019	411.903,039
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni										131.801.102,160	807.746.849,650	747.348.806,104	869.828.587,311	908.791.546,390	3.465.516.891,615
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni															
OUTPUT KEGIATAN:															
	1	Jumlah unit rumah swadaya	Unit	1.249	8.766	8.766	8.766	8.766	36.705	42.466.000,000	212.202.945,000	222.787.890,000	233.372.835,000	243.957.780,000	954.787.450,000

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit	-	799	799	799	799	3.196	-	344.324.755,700	354.637.445,962	371.486.736,381	388.336.026,800	1.458.784.964,843
3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit	-	132	88	132	132	528	88.000.000,000	248.493.275,950	167.050.400,000	261.940.800,000	273.306.000,000	1.038.790.475,950
4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	88.500,000	93.279,000	98.316,066	103.625,134	383.720,200
5	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rumah Susun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	3	-	-	-	-	3	12.407,160	-	-	-	-	12.407,160
6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	291.073,000	306.790,942	323.357,653	340.818,966	1.262.040,561
7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	180.000,000	189.720,000	199.964,880	210.762,984	780.447,864
8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	225.000,000	237.150,000	249.956,100	263.453,729	975.559,829
9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	2	-	-	-	-	-	1.322.695,000	-	-	-	-	1.322.695,000
10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	95.000,000	100.130,000	105.537,020	111.236,019	411.903,039
11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	1.846.300,000	1.946.000,200	2.051.084,211	2.161.842,758	8.005.227,169
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan									-	80.000,000	84.320,000	88.873,280	93.672,437	346.865,717

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)						
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan															
OUTPUT KEGIATAN:															
	1 Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	1	4	-	80.000,000	84.320,000	88.873,280	93.672,437	346.865,717
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS															
	2 Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu														
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh															
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh										30.000.000,000	-	-	46.300.000,000	48.400.000,000	124.700.000,000
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu															
OUTPUT KEGIATAN:															
	1 Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar	15	-	-	20	20	55	30.000.000,000	-	-	46.300.000,000	48.400.000,000	124.700.000,000	
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS															
	3 Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan														
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman															

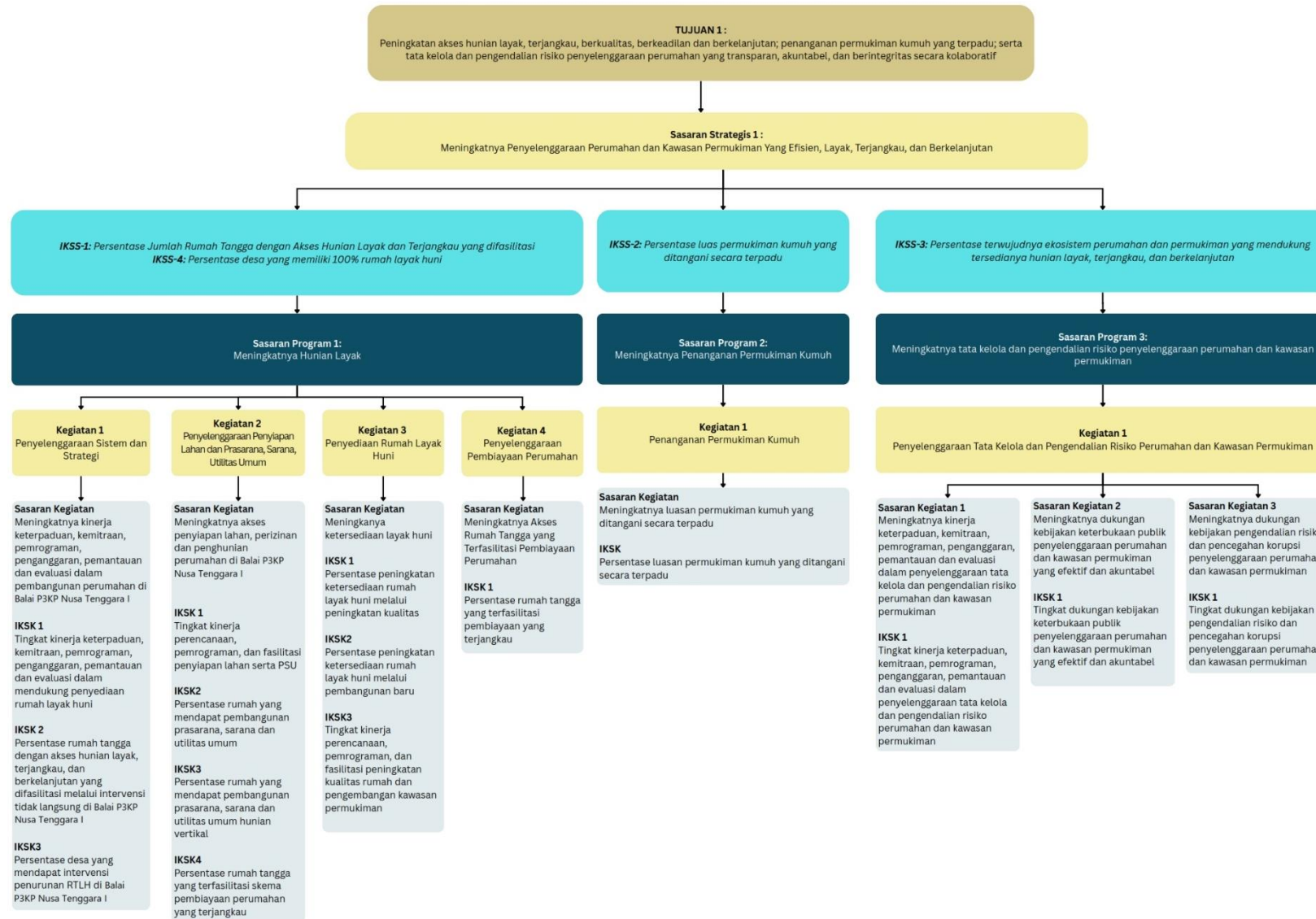
PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)						
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
KEGIATAN: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman										303.465,000	684.750,000	770.365,000	864.910,000	966.401,000	3.589.891,000
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman															
OUTPUT KEGIATAN:															
	1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	52.600,000	75.000,000	100.000,000	125.000,000	352.600,000
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel															
OUTPUT KEGIATAN:															
	1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	129.232,000	182.150,000	200.365,000	220.410,000	242.451,000	974.608,000
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman															
OUTPUT KEGIATAN:															

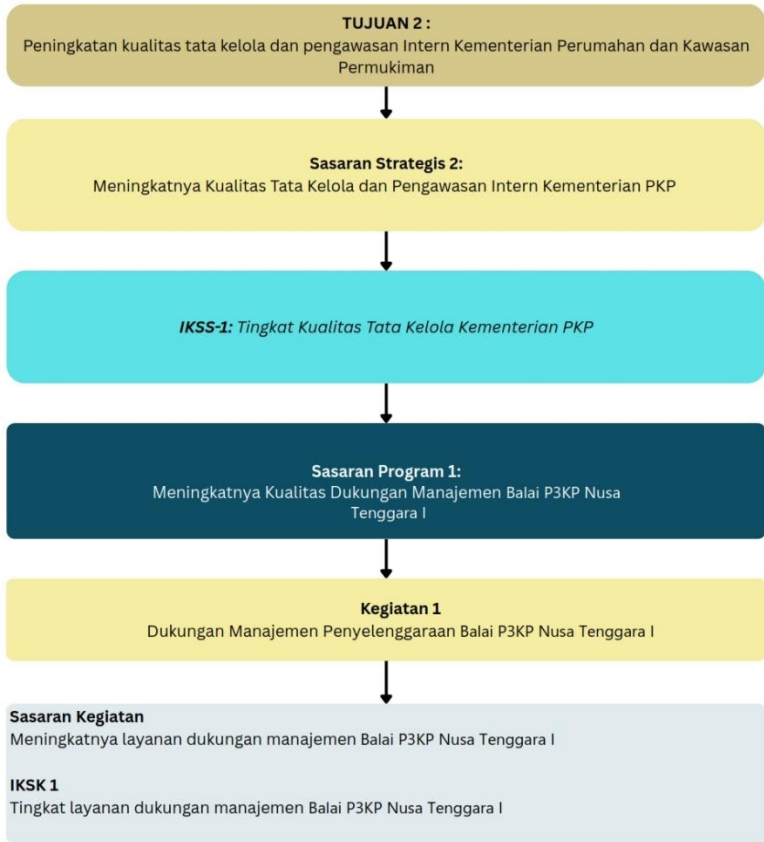
PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
1	Jumlah penerapan manajemen risiko	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	174.233,000	225.000,000	247.500,000	272.250,000	299.475,000	1.218.458,000
2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyusunan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	225.000,000	247.500,000	272.250,000	299.475,000	1.044.225,000
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman														
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS														
1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman													
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I														
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I														
OUTPUT KEGIATAN:														
1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	Layanan	3	3	3	3	3	15	14.818.218,000	40.566.487,000	42.594.811,000	44.724.552,000	46.960.780,000	189.664.848,000
2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	Layanan	3	3	3	3	3	15	24.213,000	79.200,000	83.160,000	87.318,000	91.684,000	365.575,000
3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	Layanan	-	3	3	3	3	12	-	262.500,000	276.675,000	291.615,450	307.362,684	1.138.153,134

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	-	2	2	2	2	8	-	252.000,000	265.608,000	279.950,832	295.068,177	1.092.627,009
5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	3	3	3	3	12	-	255.000,000	268.770,000	283.283,580	298.580,893	1.105.634,473
6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	Layanan	3	3	3	3	3	15	34.896,000	369.470,000	387.943,000	407.341,000	427.708,000	1.627.358,000
7	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	17.900,000	18.866,600	19.885,396	20.959,208	77.611,204
8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	14.131,000	14.894,074	15.698,354	16.546,065	61.269,493
9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	75.000,000	79.050,000	83.318,700	87.817,910	325.186,610
10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	22.000,000	23.188,000	24.440,152	25.759,920	95.388,072
11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	75.000,000	79.050,000	83.318,700	87.817,910	325.186,610
12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	3	3	3	3	12	-	300.000,000	316.200,000	333.274,800	351.271,639	1.300.746,439

LAMPIRAN II

POHON KINERJA





SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Permukiman Nusa Tenggara I		OK 2 Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Capaian = Jumlah realisasi dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2028: 1 dokumen Total : 4 dokumen	Non Kumulatif	Internal
		OK3 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Dihitung dari realisasi Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Capaian = Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 3 dokumen 2027: 0 dokumen 2029: 0 dokumen 2026: 0 dokumen 2028: 0 dokumen Total : 3 dokumen		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>OK 4 Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman</p>	<p>Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I</p> <p>Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total : 4 laporan</p>		
		<p>OK 5 Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan</p>	<p>Dihitung dari realisasi jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I</p> <p>Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan</p>	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA						
		OK 6 Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	<p>Dihitung dari realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I</p> <p>Capaian = Jumlah realisasi dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut:</p> <table> <tr> <td>2025: - dokumen</td> <td>2027: 1 dokumen</td> <td>2029: 1 dokumen</td> </tr> <tr> <td>2026: 1 dokumen</td> <td>2028: 1 dokumen</td> <td>Total : 4 dokumen</td> </tr> </table>	2025: - dokumen	2027: 1 dokumen	2029: 1 dokumen	2026: 1 dokumen	2028: 1 dokumen	Total : 4 dokumen	Non Kumulatif	Internal
2025: - dokumen	2027: 1 dokumen	2029: 1 dokumen									
2026: 1 dokumen	2028: 1 dokumen	Total : 4 dokumen									
		OK 7 Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	<p>Dihitung dari realisasi jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I</p> <p>Capaian = Jumlah realisasi laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut:</p> <table> <tr> <td>2025: 2 laporan</td> <td>2027: 2 laporan</td> <td>2029: 2 laporan</td> </tr> <tr> <td>2026: 2 laporan</td> <td>2028: 2 laporan</td> <td>Total : 10 laporan</td> </tr> </table>	2025: 2 laporan	2027: 2 laporan	2029: 2 laporan	2026: 2 laporan	2028: 2 laporan	Total : 10 laporan	Non Kumulatif	Internal
2025: 2 laporan	2027: 2 laporan	2029: 2 laporan									
2026: 2 laporan	2028: 2 laporan	Total : 10 laporan									

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SK 1 Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I	IKSK 1 Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum	OK 1 Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Capaian = Jumlah realisasi rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - unit 2027: 481 unit 2029: 481 unit 2026: 481 unit 2028: 481 unit Total : 1.924 unit	Non Kumulatif	Internal
	IKSK 2 Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal	OK 2 Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Capaian = Jumlah realisasi rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - unit 2027: - unit 2029: - unit 2026: - unit 2028: - unit Total : - unit	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA												
	IKSK 3 Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi penyiapan lahan serta PSU	OK 3 Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	<p>Dihitung dari realisasi jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I</p> <p>Capaian = Jumlah realisasi dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut:</p> <table> <tr> <td>2025: - dokumen</td> <td>2027: 1 dokumen</td> <td>2029: 1</td> </tr> <tr> <td>dokumen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2026: - dokumen</td> <td>2028: 1 dokumen</td> <td>Total : 3</td> </tr> <tr> <td>dokumen</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	2025: - dokumen	2027: 1 dokumen	2029: 1	dokumen			2026: - dokumen	2028: 1 dokumen	Total : 3	dokumen			Non Kumulatif	Internal
		2025: - dokumen	2027: 1 dokumen	2029: 1													
dokumen																	
2026: - dokumen	2028: 1 dokumen	Total : 3															
dokumen																	
OK 4 Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	<p>Dihitung dari realisasi jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I</p> <p>Capaian = Jumlah realisasi dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut:</p> <table> <tr> <td>2025: - dokumen</td> <td>2027: 1 dokumen</td> <td>2029: 1</td> </tr> <tr> <td>dokumen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2026: 1 dokumen</td> <td>2028: 1 dokumen</td> <td>Total : 4</td> </tr> <tr> <td>dokumen</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	2025: - dokumen	2027: 1 dokumen	2029: 1	dokumen			2026: 1 dokumen	2028: 1 dokumen	Total : 4	dokumen			Non Kumulatif	Internal		
2025: - dokumen	2027: 1 dokumen	2029: 1															
dokumen																	
2026: 1 dokumen	2028: 1 dokumen	Total : 4															
dokumen																	

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		OK 5 Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Capaian = Jumlah realisasi dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2028: 1 dokumen Total : 4 dokumen	Non Kumulatif	Internal
		OK 6 Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
Kegiatan 3: Penyediaan Rumah Layak Huni					

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
SK 1 Meningkatnya ketersediaan layak huni	IKSK 1	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas	OK 1 Jumlah unit rumah swadaya <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah unit rumah swadaya oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Capaian = Jumlah realisasi jumlah unit rumah swadaya di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1.641 unit 2027: 8.766 unit 2029: 8.766 unit 2026: 8.766 unit 2028: 8.766 unit Total : 36.705 unit	Non Kumulatif	Internal
	IKSK 2	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru	OK 2 Jumlah rumah khusus yang terbangun <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - unit 2027: 799 unit 2029: 799 unit 2026: 799 unit 2028: 799 unit Total : 3.196 unit	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>OK 3 Jumlah rumah susun yang terbangun</p> <p><i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i></p>	<p>Dihitung dari realisasi jumlah rumah susun yang terbangun oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I</p> <p>Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah susun yang terbangun di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 44 unit 2027: 88 unit 2029: 132 unit 2026: 132 unit 2028: 132 unit Total : 528 unit</p>	Non Kumulatif	Internal
	<p>IKSK 3 Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi peningkatan kualitas rumah dan pengembangan kawasan permukiman</p>	<p>OK 4 Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman</p>	<p>Dihitung dari realisasi jumlah dokumen teknis penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I</p> <p>Capaian = Jumlah realisasi laporan penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total : 4 laporan</p>	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>OK 5 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rumah Susun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh</p>	<p>Dihitung dari realisasi Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rumah Susun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I</p> <p>Capaian = Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rumah Susun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 3 laporan 2027: 0 laporan 2029: 0 laporan 2026: 0 laporan 2028: 0 laporan Total : 3 laporan</p>		
		<p>OK 6 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan</p>	<p>Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I</p> <p>Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total : 4 laporan</p>	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		OK 9 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	<p>Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I</p> <p>Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 laporan 2027: 0 laporan 2029: 0 laporan 2026: 0 laporan 2028: 0 laporan Total : 2 laporan</p>	Non Kumulatif	Internal
		OK 10 Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	<p>Dihitung dari realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I</p> <p>Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan</p>	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Kegiatan 1: Penanganan Permukiman Kumuh					
SK 1 Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	IKSK 1 Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	OK 1 Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Capaian dihitung dari perbandingan luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun. Capaian = Realisasi penanganan kumuh oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Target tahunan sebagai pelaksana (Ha): 2025: 18,23 Ha 2027: - Ha 2029: 20 Ha 2026: - Ha 2028: 20 Ha Total: 58 Ha	Non Kumulatif	Internal
SASARAN PROGRAM 3: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman					
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman					

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Kegiatan 1: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I					
SK 1 Meningkatkan layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I	IKSK 1 Tingkat layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I	OK 1 Jumlah Layanan Perkantoran <i>(Sekretariat Jenderal)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan perkantoran oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Capaian = Jumlah realisasi layanan perkantoran di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 3 layanan 2027: 3 layanan 2029: 3 layanan 2026: 3 layanan 2028: 3 layanan Total : 15 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 2 Jumlah Layanan Umum <i>(Sekretariat Jenderal)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 3 layanan 2027: 3 layanan 2029: 3 layanan 2026: 3 layanann 2028: 3 layanan Total : 15 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 3 Jumlah Layanan Umum <i>(Ditjen KP)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 3 layanan 2029: 3 layanan 2026: 3 layanann 2028: 3 layanan Total : 12 layanan	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		OK 4 Jumlah Layanan Umum (<i>Ditjen Perumahan Perdesaan</i>)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 2 layanan 2029: 2 layanan 2026: 2 layanann 2028: 2 layanan Total : 8 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 5 Jumlah Layanan Umum (<i>Ditjen Perumahan Perkotaan</i>)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 3 layanan 2029: 3 layanan 2026: 3 layanann 2028: 3 layanan Total : 12 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 6 Jumlah Layanan Sarana Internal (<i>Sekretariat Jenderal</i>)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan sarana internal oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Capaian = Jumlah realisasi layanan sarana internal di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 3 layanan 2027: 3 layanan 2029: 3 layanan 2026: 3 layanan 2028: 3 layanan Total : 15 layanan	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA						
		<p>OK 7 Jumlah Layanan Data dan Informasi</p> <p><i>(Ditjen KP)</i></p>	<p>Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai...</p> <p>Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai...</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut:</p> <table> <tr> <td>2025: - layanan</td> <td>2027: 1 layanan</td> <td>2029: 1 layanan</td> </tr> <tr> <td>2026: 1 layanan</td> <td>2028: 1 layanan</td> <td>Total : 4 layanan</td> </tr> </table>	2025: - layanan	2027: 1 layanan	2029: 1 layanan	2026: 1 layanan	2028: 1 layanan	Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
2025: - layanan	2027: 1 layanan	2029: 1 layanan									
2026: 1 layanan	2028: 1 layanan	Total : 4 layanan									
		<p>OK 8 Jumlah Layanan Data dan Informasi</p> <p><i>(Ditjen Perumahan Perdesaan)</i></p>	<p>Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I</p> <p>Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut:</p> <table> <tr> <td>2025: - layanan</td> <td>2027: 1 layanan</td> <td>2029: 1 layanan</td> </tr> <tr> <td>2026: 1 layanan</td> <td>2028: 1 layanan</td> <td>Total : 4 layanan</td> </tr> </table>	2025: - layanan	2027: 1 layanan	2029: 1 layanan	2026: 1 layanan	2028: 1 layanan	Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
2025: - layanan	2027: 1 layanan	2029: 1 layanan									
2026: 1 layanan	2028: 1 layanan	Total : 4 layanan									
		<p>OK 9 Jumlah Layanan Data dan Informasi</p> <p><i>(Ditjen Perumahan Perkotaan)</i></p>	<p>Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I</p> <p>Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut:</p> <table> <tr> <td>2025: - layanan</td> <td>2027: 1 layanan</td> <td>2029: 1 layanan</td> </tr> <tr> <td>2026: 1 layanan</td> <td>2028: 1 layanan</td> <td>Total : 4 layanan</td> </tr> </table>	2025: - layanan	2027: 1 layanan	2029: 1 layanan	2026: 1 layanan	2028: 1 layanan	Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
2025: - layanan	2027: 1 layanan	2029: 1 layanan									
2026: 1 layanan	2028: 1 layanan	Total : 4 layanan									

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		OK 10 Jumlah Layanan BMN <i>(Ditjen KP)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan BMN oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Capaian = Jumlah realisasi layanan BMN di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanann 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 11 Jumlah Layanan BMN <i>(Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan BMN oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Capaian = Jumlah realisasi layanan BMN di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanann 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 12 Jumlah Layanan Reformasi Kinerja <i>(Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan reformasi kinerja oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Capaian = Jumlah realisasi layanan reformasi kinerja di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 3 layanan 2029: 3 layanan 2026: 3 layanann 2028: 3 layanan Total : 12 layanan	Non Kumulatif	Internal